

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara RI (Polri) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi fungsinya memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain Polri mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material. Kegiatan menegakkan hukum, mendeteksi dan mencegah kejahatan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan, pengusutan atau penyidikan, guna mengungkapkan bukti-bukti mengenai kejahatan yang dilakukan pelaku, untuk diproses lebih lanjut oleh dan pada tingkat pengadilan yang berwenang guna menentukan macam dan tingkat kejahatan pelaku tersangka dengan ganjaran hukuman yang adil dan beradab. (**Evodia Iswandi, Mei 2006**).

Masalah yang penting untuk diperhatikan guna memahami corak kepolisian di masa depan adalah dengan memperhatikan hubungan fungsional antara masyarakat dan Polri, karena keberadaan Polri beserta fungsi-fungsinya ditentukan oleh corak masyarakat dan kebudayaannya serta corak kebutuhan-kebutuhan akan pengayoman rasa aman. Corak dari fungsi-fungsi Polri bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tergantung pada corak masyarakat dan corak kerawanan yang menjadi ciri masing-masing. (**Umar Effendi, Juli 2006**).

Ditinjau dari aspek historis, Polri telah mengalami perubahan-perubahan sejalan tuntutan perkembangan jaman. **Djamin** (2005) membagi perkembangan Polri menjadi beberapa tahap periode sejarah. Pertama, periode jaman penjajahan, dimana fungsi dan peran Polri dimanfaatkan untuk kepentingan negara pendudukan. Kedua, periode revolusi fisik pada awal kemerdekaan, dimana disamping tugasnya sebagai penegak hukum juga berfungsi sebagai *combatan* yaitu ikut berperang. Ketiga, periode tahun 1949 sampai dengan 1965 Polri berada di bawah Presiden dengan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Keempat, pada masa pemerintahan Orde Baru Polri menjadi bagian dari ABRI. Pada masa ini, Polri selain berperan dalam menjaga keamanan juga berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan tugas-tugas kemiliteran lainnya. Kelima, periode reformasi ditandai dengan adanya perubahan lingkungan strategis, global, regional dan nasional dengan isu demokratis telah mendorong perubahan peran Polri dengan paradigma baru sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Proses perubahan tersebut secara yuridis ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polri terpisah dari ABRI. (**Suparlan**, 1999; **Sutanto, dkk.** 2004).

Secara teoritik, banyak atau bervariasinya model perpolisian dikarenakan setiap pakar cenderung mencetuskan teori perpolisian berdasarkan konseptualisasi atas apa yang telah dan akan mungkin dilakukan oleh suatu organisasi kepolisian. Namun secara garis besar, perpolisian terbagi dua yaitu perpolisian konvensional serta perpolisian yang modern. (**Suparlan**, 1999; **Sutanto, dkk.** 2004).

Tipe perpolisian tradisional yaitu perpolisian yang terfokus pada upaya memerangi kejahatan melalui penegakkan hukum yang sifatnya reaktif dalam rangka pencapaian kondisi tertib hukum dan keadilan hukum. Jenis-jenis perpolisian termasuk dalam kelompok ini adalah perpolisian reaktif (*reactive policing*), perpolisian ala pemadam kebakaran (*fire brigade policing*), perpolisian paramiliter (*paramilitary policing*), perpolisian tipe putar nomor telepon (*dial-a-cop policing*), perpolisian reaksi cepat (*rapid-response policing*), perpolisian profesional (*professional policing*) dan perpolisian berorientasi penegakkan hukum (*enforcement-oriented policing*). (Suparlan, 1999; Sutanto, dkk. 2004).

Menurut **Bailey dkk** (1995) perpolisian tradisional adalah gaya pelaksanaan tugas-tugas atau aktivitas kepolisian yang bersifat sentralistik dan menekankan pada pencapaian keamanan dan ketertiban. Perpolisian tradisional memposisikan kepolisian sebagai pemburu kejahatan. Keberhasilan pelaksanaan tugas diukur berdasarkan pada pengendalian angka kejahatan, semakin besar jumlah kejahatan yang ditangani berarti semakin berhasil pelaksanaan tugas. (Bailey, 1995).

Berg (1992) mengatakan perpolisian tradisional tersebut pada dekade akhir ini dipandang tidak cukup memadai untuk mengendalikan kejahatan. Kepolisian yang memposisikan diri sebagai pengawas keamanan atau sebagai pemburu kejahatan tidak dapat menurunkan angka kejahatan seperti yang diharapkan dan kurang merespon pada kebutuhan masyarakat. Resiko atau kerugian akibat kejahatan selalu terjadi karena Polri hanya akan bereaksi setelah kejahatan terjadi. (Suparlan, 1999; Sutanto, dkk. 2004).

Selain itu, menurut **Suparlan** (1999) ada premis yang menyatakan bahwa kejahatan adalah produk kondisi sosial dari masyarakat setempat, maka pengendaliannya yang efektif adalah mencegah perkembangannya sejak dari awal di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan keterbatasan perpolisian tradisional tersebut maka sejak sekitar tahun 1970-an dikembangkan model Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) dan mendapat banyak perhatian pada tahun 1980-an. (**Bailey**, 1995).

Perpolisian Masyarakat adalah model pelaksanaan tugas kepolisian dengan menempatkan petugas kepolisian di wilayah geografis tertentu yang terbatas untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menyelenggarakan pengamanan di wilayahnya. Kegiatannya dititik-beratkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, bukan penindakan kejahatan. Jadi Perpolisian Masyarakat tidaklah untuk menggantikan perpolisian tradisional, karena tugas-tugas penegakkan hukum yang dilaksanakan fungsi reserse dan anti teror yang merupakan pendekatan tradisional, masih tetap dilaksanakan seperti biasanya. Perpolisian Masyarakat sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas maupun guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu, Polri memfokuskan pada upaya membangun kemitraan dan penuntasan masalah (*problem solving policing*), melakukan kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau pemberian jasa-jasa publik (*public service policing*), perpolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource-based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (**Evodia Iswandi**, Mei 2006).

Polri kini tengah merubah citra dirinya, berusaha berbuat komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, sikap seram dan galak kini mulai dikikis karena Polri seharusnya jadi sahabat masyarakat. Persahabatan Polri dengan masyarakat kini diwujudkan dalam sebuah program Perpolisian Masyarakat, yang mengutamakan hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat. Untuk mewujudkan perubahan baik ini, Polri telah bekerja sama dengan *Partner Shift*, sebuah lembaga *Independent* yang melakukan pengkajian khusus tentang program Perpolisian Masyarakat. (**Sofyan Lubis**, September 2006).

Manager program *Partner Shift*, **Sofyan Lubis** mengemukakan: “perubahan paradigma tingkah laku anggota Polri telah ditentukan oleh kultur yang terbangun bersama, antara lain adanya kerja sama dengan *Partner Shift* yang lebih diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan membangun kultur Polri. Perpolisian Masyarakat diharapkan bisa memberikan perbaikan tidak hanya di tubuh internal Polri tapi juga sekaligus membawa perbaikan citra Polri di masyarakat, selebihnya program ini juga akan mengajak partisipasi masyarakat agar bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri”. (**Sofyan Lubis**, September 2006).

Berkaitan dengan Perpolisian Masyarakat, Polri dan masyarakat bersama-sama bertemu secara reguler untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Masyarakat sekarang mengharapkan Polri yang ramah, Polri yang tidak selalu bertindak keras terhadap masyarakat dan sangat didambakan masyarakat tapi mereka adalah sebagai penegak hukum, walaupun mereka baik terhadap masyarakat, apabila masyarakat melakukan tindakan kriminal tetap harus dihukum. (**Sofyan Lubis**, September 2006).

Perkembangan yang pesat dari Perpolisian Masyarakat, disebabkan oleh adanya ketidakpuasan atas kinerja Polri yang dicapai melalui pendekatan perpolisian tradisional, meningkatnya kesadaran masyarakat sipil yang demokratis tentang hak-haknya atas pelayanan keamanan, dan tuntutan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. (**Suparlan**, 1999; **Sutanto, dkk.** 2004).

Kemitraan antara Polri dengan masyarakat dapat terwujud jika setiap anggota Polri mampu membangun interaksi yang harmonis dengan masyarakat. Kemampuan membangun hubungan tersebut merupakan bagian dari keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri yang tidak lepas dari peran penggunaan komunikasi interpersonal yang efektif. Hal ini sesuai kompetensi yang dibutuhkan bagi terwujudnya Perpolisian Masyarakat yaitu bahwa setiap anggota Polri bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan masalah bersama yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan anggota Polri mampu menggunakan komunikasi yang efektif agar tercipta hubungan harmonis dengan masyarakat. (**Evodia Iswandi**, Mei 2006).

Berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan bagi anggota Polri untuk menerapkan program Perpolisian Masyarakat, peneliti memperoleh data empiris berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat bahwa ditemukan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kondisi obyektif anggota Polri. Dimana didapat bahwa 61% adanya ketidakmampuan anggota Polri dalam merespon masalah-masalah masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk kurangnya pelayanan anggota Polri dalam menerima laporan, melayani dan menyelesaikan masalah dan konflik dalam masyarakat.

Sebanyak 20% anggota Polri memiliki kecenderungan tidak mudah berhubungan dengan masyarakat, bahkan cenderung curiga dan menjauh (mengambil jarak) dari masyarakat, 11% adanya sikap arogan dan sok berkuasa serta tidak mau menerima masukan orang lain dan 8% cenderung menggunakan kewenangan secara tidak semestinya. Hal itu, menurut **Skolnic** (1966) dalam **Berg** (1992) adalah sebagai pengaruh dari pelaksanaan tugas-tugas perpolisian tradisional sebagaimana yang masih diterapkan di Indonesia hingga dewasa ini. Perilaku anggota Polri masih diwarnai sikap-sikap otoriter, dan kaku pada pendapatnya yang merupakan pengaruh standar perilaku prajurit (militer), mengingat Polri pada masa yang lalu adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (**Suparlan**, 2004).

Menurut kepala bagian kemitraan Polres Bandung Timur, Ia mengatakan bahwa hal di atas selain karena pengaruh standar perilaku prajurit pada masa lalu, juga disebabkan karena masih kurangnya pemahaman mereka mengenai Perpolisian Masyarakat. Ia mengatakan anggota Polri diharapkan mampu memahami Perpolisian Masyarakat, menurutnya banyak kesalahpahaman mengenai Perpolisian Masyarakat, hal ini dikarenakan para anggota Polri kurang mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai Perpolisian Masyarakat. Ia juga menambahkan, perlu diadakan suatu kegiatan khusus yang membahas mengenai Perpolisian Masyarakat supaya anggota Polri dapat memahami Perpolisian Masyarakat dan mampu menerapkan Perpolisian Masyarakat pada lingkup kerjanya.

Selain itu, beliau mengatakan agar Perpolisian Masyarakat terwujud, disamping anggota Polri harus memahami mengenai Perpolisian Masyarakat, mereka juga wajib mengetahui cara berkomunikasi yang efektif, terutama jika Polri hendak menerapkan Polmas sebagai filosofi dasar dan strategi operasional. Dalam bekerja sama dengan masyarakat dalam konteks Perpolisian Masyarakat, dilakukan pendekatan dengan manajemen partisipatif, sehingga komunikasi yang efektif menjadi syarat keberhasilan yang utama.

Dari hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada dua puluh bintara Polri di Polres Bandung Timur, didapat bahwa 82% bintara Polri tidak memahami mengenai konsep Perpolisian Masyarakat. Selama mereka mengikuti pendidikan kepolisian, mereka tidak mendapat materi khusus mengenai Perpolisian Masyarakat sehingga mereka juga tidak mengetahui apa yang harus mereka terapkan sebagai anggota Polri untuk mewujudkan Perpolisian Masyarakat.

Kegiatan pokok anggota Polri dalam Perpolisian Masyarakat adalah berkomunikasi dengan warga masyarakat di wilayahnya. Komunikasi dilakukan kepada sebanyak mungkin masyarakat atau komponen dalam masyarakat, yang meliputi perangkat pemerintahan, tokoh masyarakat, warga masyarakat dari berbagai lapisan dan jenis pekerjaan, bahkan mendatangi (sambang) setiap rumah di wilayah penugasannya. Melakukan diskusi dengan masyarakat tentang masalah keamanan, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengamanan dan ketertiban. Ukuran kualitas anggota Polri dalam Perpolisian Masyarakat adalah seberapa besar “kedekatannya pada masyarakat”. (Suparlan, 2004).

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada dua puluh bintara Polri di Polres Bandung Timur berkaitan dengan kegiatan pokok anggota Polri dalam Perpolisian Masyarakat didapat bahwa 35% kurang mampu memperhatikan dan menjaga perasaan orang lain dalam berkomunikasi sehingga komunikasi lebih bersifat satu arah, 13% kurang mampu bersikap terbuka terhadap masukan dari masyarakat, 21% kurang mampu menghadapi beragam corak masyarakat sehingga membuat mereka tidak mampu bersikap objektif, 13% mengatakan jika mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat, salah satu yang sulit mereka kontrol adalah emosi pada saat mereka berkomunikasi, hal ini biasanya diekspresikan mereka melalui bentuk-bentuk komunikasi non verbal, seperti ekspresi wajah, mengeritkan dahi, cara meletakkan tangan dan telapak tangan ketika melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat sehingga mereka terkesan galak dan seram. Menurut bintara Polri tersebut, hal ini mereka dapatkan dari mencontoh pada seniornya yang lebih lama bertugas sebagai anggota Polri. Mereka mengatakan bahwa mereka meniru pola atasannya, karena tidak paham bagaimana menghadapi masyarakat.

Sisanya sebanyak 18% anggota Polri yang mengetahui mengenai Perpolisian Masyarakat, mengatakan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Berdasarkan pemahaman mereka tersebut, mereka berusaha menghargai pendapat masyarakat jika mereka sedang berdiskusi dalam menangani kasus, mereka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya dan berusaha bersikap ramah pada saat berhadapan dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal di atas, kendala-kendala tersebut perlu diatasi atau diubah ke arah perilaku yang dapat mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Perpolisian Masyarakat, yaitu mampu melakukan komunikasi sebanyak mungkin terhadap warga masyarakat atau komponen dalam masyarakat, mampu menghadapi masyarakat dari berbagai lapisan dan jenis pekerjaan, mampu melakukan diskusi dengan anggota masyarakat tentang masalah keamanan, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengamanan dan ketertiban. Namun pengaruh dari pelaksanaan tugas-tugas perpolisian tradisional, sebagaimana yang masih diterapkan di Indonesia hingga dewasa ini yaitu model militeristik, menyebabkan tindakan-tindakan tersebut menjadikan Polri tidak dipercaya dan jauh dari masyarakat dan citranya di mata masyarakat adalah buruk.

Berdasarkan pemikiran di atas bahwa kemitraan antara Polri dengan masyarakat dapat terwujud jika setiap anggota Polri mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan kemampuan membangun hubungan tersebut tidak terlepas dari peranan penggunaan komunikasi interpersonal yang efektif, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat pemecahan masalah berdasarkan hal tersebut.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana meningkatkan kesiapan bintara Polri untuk melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat dalam rangka Perpolisian Masyarakat di Polres Bandung Timur?

1. 3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Polri berkaitan dengan Perpolisian Masyarakat sebagai paradigma baru Polri dan membuat alternatif pemecahan masalah berdasarkan analisa kebutuhan.

1. 3. 2. Tujuan Penelitian

Memberikan suatu sumbangan pemikiran berupa rancangan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan anggota bintara Polri melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam rangka Perpolisian Masyarakat.

1. 3. 3. Kegunaan Penelitian

1. 3. 3. 1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi empiris bagi bidang Psikologi khususnya Psikologi Industri dan Organisasi mengenai pelatihan komunikasi interpersonal pada anggota bintara Polri.
2. Digunakan sebagai bahan masukan oleh peneliti lain, jika ingin melakukan penelitian serupa.

1. 3. 2. 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

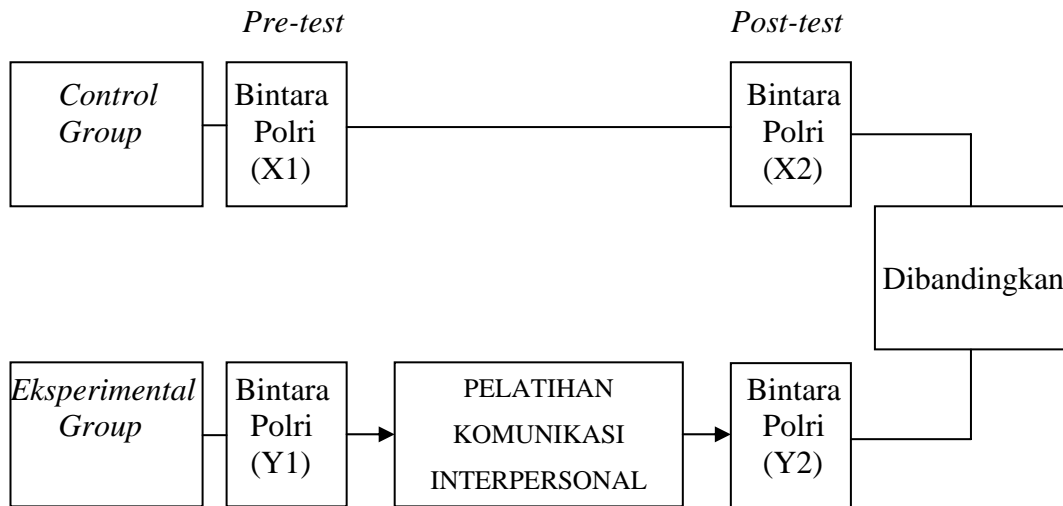
1. Diperoleh pemahaman kecenderungan perilaku anggota bintanga Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara umum dan perilaku yang diharapkan untuk pelaksanaan tugas yang berorientasi pada pelayanan sosial.
2. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dikembangkan pendekatan-pendekatan lain yang spesifik untuk peningkatan pribadi anggota Polri maupun untuk keperluan penugasan khusus.

1. 4. Metodologi

Rancangan penelitian atau metodologi menggunakan penelitian eksperimen, yaitu mengidentifikasi hubungan sebab akibat dengan melaksanakan suatu eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.

Pada kelompok kontrol tidak akan diberikan intervensi berupa pelatihan komunikasi interpersonal, hanya pada kelompok eksperimen yang akan diberikan intervensi berupa pelatihan komunikasi interpersonal. Setelah kelompok eksperimen mendapatkan pelatihan, pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan dilihat perbandingannya. Hasil *pre test* dan *post test* pada kedua kelompok tersebut akan dibandingkan untuk melihat efektivitas pelatihan yang diberikan kepada kelompok eksperimen.

Berikut adalah rancangan penelitiannya:



Bagan 1. 4. Skema Metodologi Penelitian